

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JL. HM. Sarbini No.99 Kabupaten
kebumen,Kodepos 54316,Telepon: (0287)
381128 Fax: (0287) 382831 Kebumen



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Fungsi Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama.....	18
1.4 Landasan Hukum	19
BAB II	23
PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis.....	23
2.2 Rencana Program,Kegiatan,Indikator Kinerja	28
2.3 Perjanjian Kinerja	42
BAB III	46
AKUNTABILITAS KINERJA	46
3.1 Capaian Kinerja DPUPR Ta.2023.....	47
3.3 Realisasi Anggaran Belanja	62
BAB IV	70
PENUTUP	70
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	70
B. Permasalahan dan Kendala	71
C. Strategi Peningkatan Kinerja DPUPR	72

Daftar Tabel

1. Tabel 1 Jumlah Pegawai berdasarkan jenjang Pendidikan Tahun 2023	13
2. Tabel 2 Jumlah Pegawai berdasarkan kualifikasi golongan Tahun 2023	13
3. Tabel 3 Jumlah Pejabat struktural Tahun 2023	13
4. Tabel 4 Sarana dan Prasarana Sampai Dengan Tahun 2023	14
5. Tabel 5 Sasaran Strategis	27
6. Tabel 6 Tujuan dan Sasaran Strategis	28
7. Tabel 7 Indikator Kinerja DPUPR	40
8. Tabel 8 Indikator Kinerja Utama Dinas	40
9. Tabel 9 Perjanjian Kinerja Dinas.....	42
10. Tabel 10 Anggaran Perjanjian Kinerja Dinas	42
11. Tabel 11 Realisasi Indikator Sasaran Dinas	48
12. Tabel 12 Realisasi Capaian Kinerja Dinas.....	48
13. Tabel 13 Realisasi Capaian Kinerja Dinas.....	51
14. Tabel 14 Kemajuan Sasaran Dinas	52
15. Tabel 15 Realisasi Capaian Kinerja Dinas.....	53
16. Tabel 16 Ketersediaan Panjang Jalan Tahun 2022 – 2023	54
17. Tabel 17 Capaian Jalan dalam kondisi Mantap Tahun 2023	55
18. Tabel 18 Ketersediaan Jalan Tahun 2021 – 2026	55
19. Tabel 19 Capaian Pelayanan Air Bersih sesuai SPM Tahun 2023	57
20. Tabel 20 Realisasi Pelayanan Air Bersih Perpipaaran.....	57
21. Tabel 21 Capaian Pelayanan Air Bersih ahun 2023	58
22. Tabel 22 Capaian Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi Baik	59
23. Tabel 23 Capaian Realisasi keuangan Tahun 2023	58

Daftar Gambar

1. Gambar Struktur Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2023	4
2. Gambar Prosentase Tingkat pelayanan Infrastruktur Wilayah.....	53
3. Gambar Jalan Kondisi Mantap.....	56
4. Gambar Capaian Air bersih	59
5. Gambar Capaian Irigasi Kondisi Baik	60

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah Kami Panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Limpahan Rahmat dan Karuniaya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan Akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan Kinerja Organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa Output maupun Outcome.

Disisi lain Laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan Kinerja beserta Permasalahan dan solusi dalam Pelaksanaan Tugas, Pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (Peraturan IKU Instansi).

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui Laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen melalui Pelaksanaan Kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahunan 2023, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

Kebumen, Februari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten
Kebumen



JONI HERNAWAN, S.T.,M.T
NIP. 19700728 199803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu Dinas Teknis yang menangani urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar, diantaranya urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencakup Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan, Jembatan, Sarana dan Prasarana Air Bersih, Drainase, Gedung, Selain itu juga memberikan Pelayanan Persewaan alat berat, Pelayanan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Urusan Pertanahan yang berkaitan dengan inventarisasi Sengketa, Konflik dan perkara Pertanahan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintah yang baik (good governance).

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen di dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya secara lebih baik dan benar, berdasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi Instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Menjamin kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen di dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Materi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen ini dimulai dari penjabaran rencana Strategi (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Strategi). Sampai dengan pengukuran keberhasilan rencana tersebut dengan penilaian atas aktivitas Program dan Evaluasi Kinerja

1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai tugas membantu Bupati dalam Melaksanakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- b. perumusan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- e. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang, dan pertanahan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan sebagai urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dan UPT.

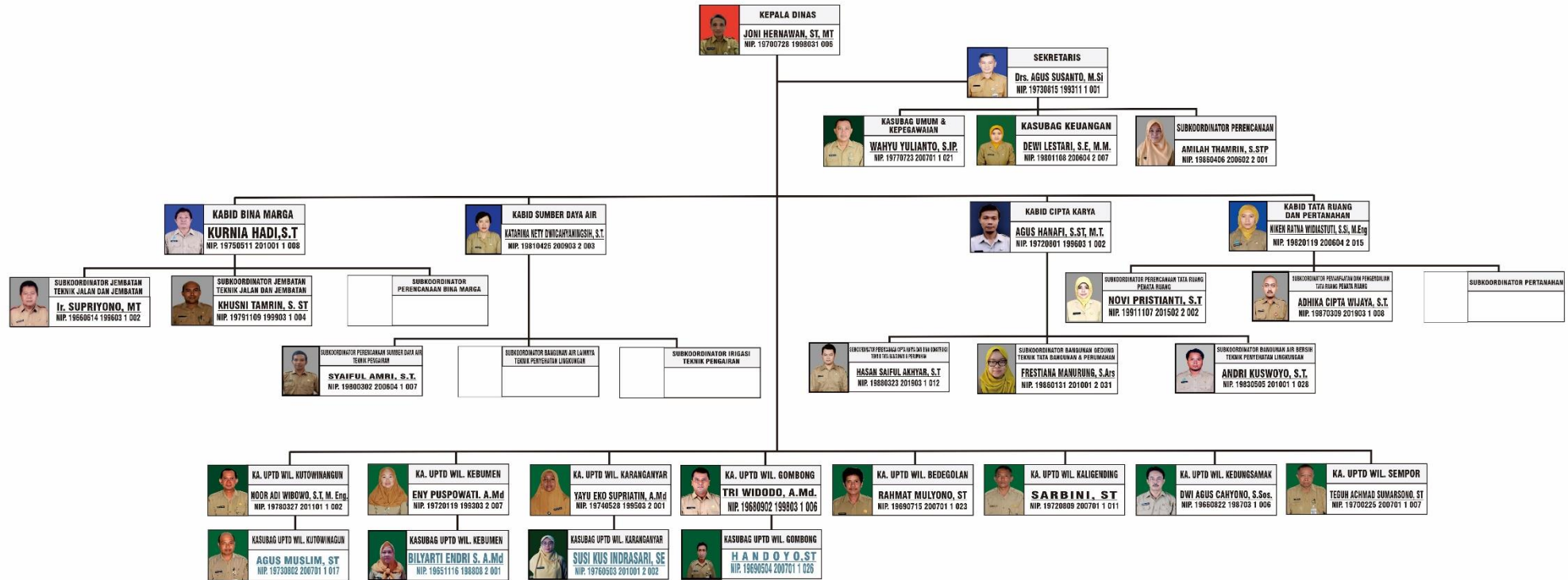
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen meliputi:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Bina Marga;
 - b. Subkoordinator Jalan; dan
 - c. Subkoordinator Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Cipta Karya dan Bina Konstruksi;
 - b. Subkoordinator Bangunan Gedung; dan
 - c. Subkoordinator Bangunan Air Bersih.
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air;
 - b. Subkoordinator Irigasi; dan
 - c. Subkoordinator Bangunan Lainnya.
- f. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 - a. Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang; dan
 - c. Subkoordinator Pertanahan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) wilayah :
 - a. UPTD PBPJJ Wilayah Gombong
 - b. UPTD PBPJJ Wilayah Karanganyar
 - c. UPTD PBPJJ Wilayah Kebumen
 - d. UPTD PBPJJ Wilayah Kutowinangun
 - e. UPT PJI SDA Sempor
 - f. UPT PJI SDA Kedungsamak
 - g. UPT PJI SDA Kaligending
 - h. UPT PJI SDA Bedegolan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2023



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN**



PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 113 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

1. Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah serta mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana dan program di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 2) Perumusan kebijakan di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 5) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di Bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Pertanahan;
- 6) Pelaksanaan administrasi Dinas;
- 7) Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT (Unit Pelaksana Teknis Dinas); dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kersipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas..

Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Sekretariat membawahi :

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, Kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan dinas.
- b) Sub Bagian Keuangan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.

- c) Subkoordinator Perencanaan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengoordinasian dan penyusunan, pengendalian dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas

c. Bidang Bina Marga

Melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi jalan, jembatan, operasional dan pemeliharaan, dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perencanaan bina marga;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jalan;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jembatan;.
- 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Marga membawahi :

- a) Subkoordinator Perencanaan Bina Marga Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina marga. Meliputi penyelenggaraan perencanaan teknis program dan kegiatan pembangunan, serta menyiapkan bahan peningkatan operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- b) Subkoordinator Jalan yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang jalan meliputi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jalan, serta perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan.
- c) Subkoordinator Jembatan yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang jembatan meliputi penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan jembatan serta perencanaan pembangunan dan peningkatan jembatan.

d. Bidang Cipta Karya

Melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan air bersih bangunan gedung, dan pembinaan konstruksi, dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan cipta karya;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bangunan gedung;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembinaan konstruksi;
- 4) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan air bersih;
- 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Cipta Karya membawahi :

- a) Subkoordinator Perencanaan Cipta Karya dan Bina Konstruksi; mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan cipta karya dan bina konstruksi meliputi perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data perencanaan pembangunan beserta anggarannya, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan perencanaan cipta karya serta pelaksanaan administrasi teknik dan pembinaan konstruksi
- b) Subkoordinator Bangunan Gedung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bangunan gedung. meliputi perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data perencanaan pembangunan beserta anggaran di bidang bangunan gedung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, bimbingan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan perencanaan teknis bangunan gedung serta pelaksanaan administrasi teknik.

- c) Subkoordinator Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang air bersih meliputi perumusan perencanaan dan penyuluhan, pembinaan teknis dan sosialisasi pengelolaan air bersih, perbaikan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi serta pelaksanaan administrasi teknik.

e. Bidang Sumber Daya Air

Melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi irigasi, sungai, pantai, drainase, dan air baku, dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan irigasi;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sungai, pantai, dan drainase;
- 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan air baku;
- 4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air membawahi :

- a) Subkoordinator Perencanaan Sumber Daya Air yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan sumber daya air. Meliputi menyiapkan bahan penyelenggaraan perencanaan teknis program dan kegiatan pembangunan, peningkatan operasional dan pemeliharaan irigasi dan bangunan air lainnya.
- b) Subkoordinator Irigasi yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang irigasi. Meliputi menyiapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, peningkatan dan rehabilitasi daerah irigasi serta pengelolaan system irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) hektar.

- c) Subkoordinator Bangunan Air Lainnya yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bangunan air lainnya. meliputi pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan bangunan air lainnya, serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai, pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.

- f. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan bertugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan. dengan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perencanaan tata ruang;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pertanahan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan membawahi

- a. Subkoordinator Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan tata ruang. Meliputi menyiapkan bahan perumusan dan penyuluhan, pembinaan teknis dan sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pelaksanaan administrasi teknik.
- b. Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang meliputi menyiapkan bahan perumusan perencanaan dan penyuluhan, bahan pembinaan teknis dan sosialisasi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pelaksanaan administrasi teknik.

- c. Subkoordinator Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pertanahan meliputi menyiapkan perumusan, perencanaan, penelitian, pengumpulan, pengelolaan, penyajian data pertanahan, pembinaan, bimbingan, bantuan teknis pengkajian serta perumusan pedoman persyaratan, pelaksanaan administrasi pertanahan, pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah,
- g. Kepala Unit Pelaksana Teknis
bertugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya. Subkoordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

2. Tata Kerja

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Subkoordinator, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok masing-masing, sebagai berikut :

- a. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- b. Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap pimpinan unit organisasi, pejabat fungsional dan pelaksana wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja..
- e. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dari bawahannya diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Kebumen per 31 Desember 2023 sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) yang terdiri dari 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang PNS, 4 (dua) orang PPPK dan didukung oleh 60 (empat puluh) Petugas Penunjang Kegiatan. Komposisi pegawai berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan golongan dapat disajikan dalam uraian di bawah ini.

a. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel.1
Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	SD/MI	8	Orang
2	SLTP/MTS	9	Orang
3	SLTA/MA	113	Orang
4	Diploma I, II dan III	12	Orang
5	Diploma IV/ Strata I	33	Orang
6	Strata II	7	Orang
Total		182	Orang

Sumber Data: Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2023

b. Pegawai Berdasarkan Golongan

Gambaran Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel.2
Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan Tahun 2023

No	Kualifikasi Golongan	Jumlah	Satuan
1	Golongan I	6	Orang
2	Golongan II	103	Orang
3	Golongan III	65	Orang
4	Golongan IV	4	Orang
5	P3K	4	Orang
Total		182	Orang

Sumber Data: Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2023

c. Pegawai Berdasarkan Golongan

Gambaran Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel.3
Pejabat Struktural Tahun 2023

No	Jabatan Struktural	Jumlah	Satuan
1	Eselon II b (kadinan)	1	Orang
2	Eselon III a (sekdin)	1	Orang
3	Eselon III b (kabid)	4	Orang
4	Eselon IV a (kasubag/ka.UPT)	11	Orang
5	Eselon IV b (Ka.Tu di UPT)	4	Orang
Total		21	Orang

4. Sarana dan prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, sampai dengan Tahun 2023 tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel.4
Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
ALAT ANGKUTAN						
1	Gerobak Dorong	12			12	
2	Alat angkutan darat bermotor lainnya (dst)	1			1	Kendaraan Roda 3
3	Pick Up	4	5	1	10	
4	Semi Trailer	1			1	
5	Sepeda Motor	64	29	4	97	
6	Station Wagon	4	3		7	
7	Truck + Attachment		1		1	
KOMPUTER						
8	Hard Disk	2			2	
9	Internet	1			1	
10	Komputer Jaringan lainnya	1			1	
11	Lap Top	69		1	70	
12	Monitor	1			1	
13	P.C Unit	22			22	
14	Peralatan Jaringan lainnya	6			6	
15	Peralatan Jaringan lainnya				1	
16	Peralatan Jaringan lainnya				4	
17	Peralatan Personal Komputer lainnya	2			2	
18	Personal Komputer lainnya	4			4	
19	Plotter (Peralatan Mainframe)	1			1	

20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	69	5	4	78	
21	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1			2	
	LAIN-LAIN					
22	A.C. Window	75	5		80	
23	Air Compressor (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	2			2	
24	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	4	1		5	
25	Alat Kantor Lainnya	3	1		4	
26	Alat Rumah Tangga Lain-lain	90	9		99	
27	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	3			3	
28	Amplifier	1			1	
29	Asphalt Finisher	1			1	
30	Asphalt Mixing Plant	1			1	
31	Audio Tape Reel Recorder		1		1	
32	Bangku Tunggu	3			3	
33	Brandkas	7	1		8	
34	Camera Electronic	10		1	11	
35	Camera film	1			1	
36	Camera Video	19		1	20	
37	Concrette Hammer Set	1			1	
38	Copy Board/Elektrik White Board	1			1	
39	Digital Audio Taperecorder		2		2	
40	Dispenser				10	
41	Dump Truck			4	4	
42	electric generating set lainnya (dst)	10	1		11	
43	excavator lainnya (dst)	8		1	9	
44	Filing Cabinet Besi	42	29		71	
45	Fire Extinguisher	1			1	
46	Gergaji		5		5	
47	Global Positioning System	6			6	
48	Grating Generator Unit	2	1		3	
49	Handy Cam	2			2	
50	Handy Talky (HT)	4			4	
51	Jam Elektronik		1		1	
52	Kipas Angin	5	16		21	
53	Kompore Gas (Alat Dapur)	1			1	
54	Kursi Biasa	44	69		113	
55	Kursi Fiber Glas/Plastik	7	26		33	
56	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6			6	
57	Kursi Kayu	58	6		56	
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon	10			10	
59	Kursi Lipat	6	50		56	

60	Kursi Putar	23	23		46	
61	Kursi Rapat	138			138	
62	Kursi Tamu	8	17		22	
63	Layar LCD Projector/Infocus	2			2	
64	LCD Projector/Infocus	10			10	
65	Lemari Besi/Metal	16	10		26	
66	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis		14		14	
67	Lemari Kaca		1		1	
68	Lemari Kayu	25	22		47	
69	Lemari Penyimpan		5		5	
70	Lemari Sorok		1		1	
71	Loudspeaker	8	1		9	
72	Meja 1/2 Biro	146	92		238	
73	Meja Kerja		2		2	
74	Meja Kerja Kayu	4			4	
75	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1			1	
76	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2	
77	Meja Komputer	9	10		19	
78	Meja Maket/Peta	1			1	
79	Meja Rapat	48	11		59	
80	Meja Resepsionis	1			1	
81	Meja Tambahan		1		1	
82	Meja Telepon	1			1	
83	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	13		2	15	
84	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	5		1	6	
85	Mesin Pemotong Rumput	14			14	
86	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1			1	
87	mesin proses lainnya (dst)	8	9		17	
88	Mimbar/Podium	1			1	
89	Overhead Projector				1	
90	Papan Nama Instansi	6	1		7	
91	Peralatan Las Karbit		1		1	
92	Peralatan Permainan lainnya	1	1		2	
93	peralatan umum lainnya (dst)	5			5	
94	perkakas bengkel kerja lainnya (dst)		10		10	
95	Pesawat Kip	1			1	
96	Pesawat Telephone	9	3	1	13	
97	Peta				2	
98	Pisau Lempar	1			1	
99	pompa lainnya (dst)	20			20	

100	Portable Water Pump	6			6	
101	Power Amplifier	1			1	
102	Pressure Vessel (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	1			1	
103	Rak Besi	18	16		34	
104	Rak Kayu	11	12		23	
105	Rak Peralatan		2		2	
106	Rol Meter	5			5	
107	Sice				13	Ruang tamu Kadinas, Kabid dan UPTD
108	Sofa	2	1		3	
109	Sound System	1			1	
110	Stabilizer		2		2	
111	Tandam Roller	6			6	
112	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	1		2	
113	Televisi	9	6	1	16	
114	Tempat Tidur Kayu	1			1	
115	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	3			3	
116	Tool Cabinet Set		1		1	
117	Tool Kit Box		1		1	
118	Truck Loader + Attachment	1			1	
119	Truck Crane	1			1	
120	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3			3	
121	Unit Power Supply	1	1		2	
122	Video Printer	1			1	
123	Water Level Meter		1		1	
124	Wheel Loader + Attachment		2		2	
125	White Board	3	14		17	
126	White Board Electronic	1			1	
127	Wireless	2	1		3	
128	Work Bench (Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola)	1			1	
129	Yeengler/Trailer				1	
	Total	1.274	563	22	1.881	

Sumber Data: Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2023

kondisi sarana dan prasarana yang ada sebagaimana tabel di atas, guna menunjang pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen perlu dilakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dimiliki,

1.3 Fungsi Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan Langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2021-20226 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan Jalan dilaksanakan melalui kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan.
2. Strategi Peningkatan Pembangunan Drainase dilaksanakan melalui kebijakan Pembangunan dan Pemeliharaan Drainase.
3. Strategi Peningkatan Akses Air Minum dilaksanakan dengan Pembangunan dan Pemeliharaan SPAM.
4. Strategi Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Jaringan Air Baku melalui kebijakan Peningkatan Koordinasi dan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air.
5. Strategi Meningkatkan Pengelolaan Konservasi SDA melalui Peningkatan Pengelolaan Konservasi SDA.
6. Strategi Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Lembaga Perwakilan Daerah dan Kualitas Administrasi Perkantoran serta Kapasitas Keuangan Daerah melalui kebijakan Peningkatan Sumber Daya Pegawai dengan mengirimkan peserta diklat, seminar dan lokakarya dan Peningkatan Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air dengan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tidak lepas dari berbagai permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsinya. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Masih rendahnya pelayanan infrastruktur jalan yang baik, hal ini dapat dilihat dari Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap tahun 2023, total panjang Jalan Kabupaten adalah 1.017,150 Km, Dimana Proporsi jalan Kabupaten Kebumen Dimana Jumlah perhitungan jalan rusak bertambah pada Triwulan 4 yang menyebabkan turunya kondisi jalan yang tadinya baik menjadi sedang, sedang menjadi rusak ringan dan rusak ringan menjadi rusak berat yang di sebabkan oleh bencana alam

- b. Meningkatnya kerusakan jalan akibat kondisi struktur tanah yang labil, curah hujan yang tinggi, bencana alam dan tingkat penggunaan jalan yang Over Load Over Dimension (ODOL).
- c. Masih adanya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan pemanfaatan ruang.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kebumen dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- e. Masih ditemukan daerah yang mengalami krisis air bersih pada musim kemarau terutama daerah pegunungan, akibat ketiadaan sumber mata air atau sumber mata air mati serta kerusakan bangunan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) karena pengelolaan yang tidak baik. Wilayah Kabupaten Kebumen yang berpotensi krisis air bersih meliputi Kecamatan Ayah, Rowokele, Buayan, Sempor, Karanggayam, Sruweng, Karangsambung, Sadang, Padureso, Alian Poncowarno dan Kemangguan
- f. Masih ditemukan genangan akibat kurang optimalnya fungsi drainase.
- g. Belum optimalnya rehabilitasi Daerah Irigasi untuk menunjang produktivitas pertanian guna mendukung kedaulatan pangan serta adanya kejadian bencana yg menyebabkan kerusakan jaringan irigasi
- h. Masih kurang penanganan kerusakan sungai, muara, dan pantai akibat banjir dan abrasi gelombang air laut.

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku, antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021–2026
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
 22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, gambaran umum organisasi, struktur organisasi dan Tata Kerja, Aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, serta Landassan Hukum dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi uraian Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Strategis (RENSTRA) yang hendak dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target Indikator Sasaran Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang Capaian Kinerja Organisasi dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada). Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah ditentukan, analisis dan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan Realisasi Anggaran.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja, termasuk tinjauan umum capaian kinerja, permasalahan/ kendala, serta strategi peningkatan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah Menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2021-2026 dengan memberikan pelayanan terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, pembangunan air bersih, drainase, pembangunan gedung pemerintah, pembangunan/ pemeliharaan jaringan irigasi, sungai dan embung. Pelaksanaan pelayanan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahun, mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun Langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang dilaksanakan di RPJMD 2021-2026 mengacu pada Permendagri 90 Tahun 2019 dimana jenis program, kegiatan dan sub kegiatan telah disediakan dalam peraturan tersebut. .

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga urusan, yaitu :

- a. Pertama, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dan menjadi urusan semua OPD, namun tidak berhubungan langsung dengan sasaran dan tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra OPD. Program dan kegiatan ini merupakan aktivitas manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan OPD sehari-hari seluruh bidang.
- b. Kedua, kelompok program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan perencanaan OPD dan kewajiban sebagai OPD penghasil yang tercantum dalam Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
- c. Ketiga, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra OPD atau dalam hal ini Urusan Wajib Pelayanan dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Rencana program dan kegiatan beserta indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun ke depan mejadi pedoman dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, anggaran, dan pelaporan selanjutnya.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

1) Visi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Visi Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“ MEWUJUDKAN KABUPATEN KEBUMEN SEMAKIN SEJAHTERA,
MANDIRI, BERAKHLAK BERSAMA RAKYAT”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a) Sejahtera

Terwujudnya suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

b) Mandiri

Mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila

perekonomian yang akan dijalankan merupakan perkonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa wisata mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

c) Berakhlak

Menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai – nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Akronim dari Visi Bupati Kebumen adalah :

“KEBUMEN SEMARAK”

“Kebumen Sejahtera, Mandiri, Barakhlak Bersama Rakyat”

2) Misi

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah antara lain :

- a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi

- b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
- c. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- e. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Perangkat Daerah. Dalam dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi Perangkat Daerah. Misi ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas Langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi Perangkat Daerah.

Dalam perumusan misi tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen memperhatikan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mendukung terlaksananya Misi ke 1 (satu) dan Misi IV RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Misi I : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi

Tujuan dan Sasaran Misi I adalah :

- 1. Tujuan
 - a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi

2. Sasaran
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Misi IV : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Tujuan dan Sasaran Misi IV adalah :

1. Tujuan
 - a. Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
2. Sasaran
 - b. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah

Tabel 5
Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83	84	85	85,5	86
2	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	53,81	59,27	63,10	66,89	70,69

Sumber : RPJMD Kebumen Tahun 2021-2026.

2.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja

Tujuan dan sasaran adalah merupakan kondisi yang diharapkan akan terwujud dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang akan datang. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD mengacu pada tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026. Uraian mengenai tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan bidang pekerjaan umum, terutama sebagai OPD yang berkontribusi untuk pencapaian target Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk mengukur keberhasilan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka perlu ditetapkan indikator dan target kinerja sasaran selama periode Renstra.

Tabel 6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat			
MISI I : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik	1. Pembenahan Struktur dan Prosedur Birokrasi 2. Perbaiki sistem dan manajemen sumber daya aparatur serta peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur 3. Pelayanan publik yang prima
MISI IV : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1. Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan serta infrastruktur prioritas lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Pengembangan Wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 2. pembangunan sistem jaringan prasarana jalan di antaranya berupa: a. Pengembangan jalan tol berupa pengembangan ruas jalan tol Cilacap – Yogyakarta

			<ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan jaringan jalan lintas selatan (JJLS) dari Wawar – Tambak Mulyo – Jladri – Ayah – Bodo c. Pengembangan Rencana Jalan Lintas Kabupaten Banjarnegara (Banjarnegara – Kebumen – Batang dan Pekalongan) d. Peningkatan jalan menuju wisata yang mendukung Geopark Nasional Karangsembung-Karangbolong e. Penyediaan jalan menuju kawasan industri <p>3. Pengembangan pada sistem jaringan prasarana lain di antaranya yang cukup signifikan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Keburejo <p>4. Pengembangan Koridor Jalan Arteri Primer Wilayah Perkotaan Kebumen</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koridor jalan arteri primer yang melewati wilayah Kelurahan Panjer, Kebumen, dan Kutosari b. Koridor jalan arteri sekunder yang melewati Kelurahan Tamanwinangun, Panjer, Kebumen, Bumirejo, dan Kutosari
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk mencapai misi tersebut di atas maka perlu ditetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai penjabaran kebijakan, dalam 5 (lima) tahun mendatang, meliputi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan tetap mengacu pada program pembangunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

Dalam mendukung pencapaian Target Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten tahun 2023, DPUPR melaksanakan 2 Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 9 (Sembilan) Program, 23 (dua puluh tiga) dan 77 Sub Kegiatan dan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Sub Kegiatan, Rencana program kerja dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 tercermin dalam pencapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut :

A. Sekretariat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - d) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - b) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyediaan Bahan/Material
 - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Mebel
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

B. Bidang Pelaksana Tekhnis Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Jalan

1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
- b) Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- c) Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Pada Tahun 2023 dilaksanakan Penyusunan Dokumen Survey Kondisi Jembatan

- d) Pembangunan Jalan

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Pembangunan pada ruas jalan Pembangunan Jalan kepadang – kaleng, Jalan Peniron – Kebakalan, Jalan Rogodono – Pringtutul,

- e) Pelebaran Jalan Menuju Standar

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pekerjaan Pelebaran Jalan Giwangretno – Adikarto, Jalan Karanganyar – Kemujan, Jalan Kemujan-Adikarto, Jalan Kemujan – Karang Sari, Jalan Kemujan - Karang Sari Lanjutan, Jalan Krakal – Pujotirto dan jalan Lerep - Karangtengah

- f) Pemeliharaan Berkala Jalan

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Giritirto – Plipitan, Pemeliharaan Berkala Jalan Gombang – Kuwarasan, Pemeliharaan Berkala Jalan Jatisari – Kejayan, Pemeliharaan Berkala Jalan Karanggayam – Kebakalan, Pemeliharaan Berkala Jalan Karang Sari - Babadsari (RT.01/RW.03) (P) dan Pemeliharaan Berkala Jalan Karang Sari - Babadsari (RT.02/RW 3 (P), Pemeliharaan Berkala Jalan Kedungbajul – Poncowarno, Pemeliharaan Berkala Jalan Klirong – Petanahan, Pemeliharaan Berkala Jalan Kuwarasan – Puring, Pemeliharaan Berkala Jalan Mrentul – Pujodadi, Pemeliharaan Berkala Jalan Pagebangan – Somagede, Pemeliharaan Berkala Jalan Pandansari – Watulawang, Pemeliharaan Berkala Jalan Pahlawan/Soekarno Hatta Sutoyo, Pemeliharaan Berkala Jalan Poncowarno – Karangtengah, Pemeliharaan Berkala Jalan Pondok Tamanan, Pemeliharaan Berkala Jalan Purwosari- Tambaharjo, Pemeliharaan Berkala Jalan Purwosari- Tambaharjo (P),

Pemeliharaan Berkala jalan Sidomukti - Bonjok (P), Pemeliharaan Berkala jalan Tamanwinangun - Bocor, Pemeliharaan Berkala Jalan Wiromartan - TPI

g) Pemeliharaan Rutin Jalan

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Rutin Penanganan Darurat Jalan Buayan – Jladri, Penanganan Darurat Jalan Selokerto – Buayan, Pemeliharaan Rutin Jalan Tersobo – Bonorowo, Rekonstruksi Box Culvert Pada Ruas Jalan Gombang – Kuwarasan, Rekonstruksi Box Culvert Pada Ruas Jalan Gombang – Kuwarasan, Penanganan Darurat Ruas Jalan Dorowati - Podourip (Desa Banjarwinangun, Sidomulyo, Dorowati), Penanganan Darurat Ruas Jalan Soka - Klirong (Desa Kaliwungu, Dan Desa Kuwayuhan), Penanganan Longsor Ruas Jalan Giritirto - Plipitan (Dusun Plipitan Desa Giritirto), Pemeliharaan Jembatan Siluwuk pada Ruas Jalan Pagebangan - Somagede (Desa Binangun), Pemeliharaan Rutin Jalan Sidomulyo – Patemon, Pemeliharaan Rutin Jalan Kedungwinangun – Bendogarap, Pemeliharaan Rutin Jalan Klirong - Pandan (Desa Bendogarap), Pemeliharaan Rutin Jalan Ungaran - Triwarno (Desa Pejagatan), Pemeliharaan Rutin Jalan Jatinegara - Purbowangi (Desa Kalibeji), Pemeliharaan Rutin Jalan Dorowati - Podourip (Desa Kritig), Pemeliharaan Rutin Jalan Mertokondo - Karangsembung (Desa Langse), Pemeliharaan Rutin Jalan Banjarejo – Rogodono, Pemeliharaan Rutin Jalan Gentan - Miritpetikusan (Desa Winong), Pemeliharaan Rutin Jalan Miritpetikusan - Pantai (Desa Miritpetikusan), Pemeliharaan Rutin Jembatan Domas Ruas Jalan Wonotirto - Gunungsari (Desa Kalibening), Pelebaran Jembatan pada Ruas Jalan Peniron – Karanggayam, Pemeliharaan Rutin Jalan Purwogondo - Buayan (Desa Kalipurwo) dan lainnya.

h) Pembangunan Jembatan

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan Desa Kedungjati Kecamatan Sempor, Pembangunan Jembatan Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor

i) Pemeliharaan Berkala Jembatan

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Pelebaran Jembatan Pada Ruas Jalan Meles – Banjareja, Pelebaran Jembatan Pada Ruas Jalan Pandansari – Watulawang, Pelebaran Jembatan Pada Ruas Jalan Peniron - Karanggayam

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

- a) Penyusunan Rencana, kebijakan, Strategi dan Tekhnis SPAM
- b) Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaaan.

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Pembangunan SPAM sebanyak 26 Paket baik dari dana DAK maupun dana lainnya, diantaranya Pembangunan SPAM Desa Jatipurus Kecamatan Poncowarno (DAK), Pembangunan SPAM Desa Adiwarno Kecamatan Buayan (DAK), Pembangunan SPAM Desa Argopeni Kecamatan Ayah (DAK), Pembangunan SPAM Desa Argosari Kecamatan Ayah (DAK), Pembangunan SPAM Desa Banjararjo Kecamatan Ayah (DAK), Pembangunan SPAM Desa Binangun Kecamatan Karanggayam (DAK), Pembangunan SPAM Desa Bojongsari Kecamatan Alian (DAK), Pembangunan SPAM Desa Bumiagung Kecamatan Rowokele (DAK), Pembangunan SPAM Desa Candirenggo Kecamatan Ayah (DAK),Pembangunan SPAM Desa Cangkring Kecamatan Sadang (DAK), Pembangunan SPAM Desa Gesikan Kecamatan Kebumen (DAK), Pembangunan SPAM Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam (DAK), Pembangunan SPAM Desa Glontor Kecamatan Karanggayam (DAK), Pembangunan SPAM Desa Jatijajar Kecamatan Ayah (DAK), Pembangunan SPAM Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele (DAK), Pembangunan SPAM Desa Jladri Kecamatan Buayan (DAK), Pembangunan SPAM Desa Kaligending Kecamatan Karangsambung (DAK), Pembangunan SPAM Desa Kalirancang Kecamatan Alian (DAK), Pembangunan SPAM Desa Karangbolong Kecamatan Buayan (DAK), Pembangunan SPAM Desa Kedungweru Kecamatan Ayah (DAK), Pembangunan SPAM Desa Kretek Kecamatan Buayan (DAK), Pembangunan SPAM Desa Mengkowo Kecamatan Kebumen (DAK), Pembangunan SPAM Desa Muktisari Kecamatan Kebumen (DAK), Pembangunan SPAM Desa Murtirejo Kecamatan Kebumen (DAK), Pembangunan SPAM Desa Sembirkadipaten Kecamatan Prembun (DAK), Pembangunan SPAM Desa Sidomoro Kecamatan Buluspesantren (DAK)

a. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan Peningkatan SPAM sebanyak 14 Paket dari dana (APBD),Peningkatan SPAM Desa Banyumudal Kecamatan Buayan (MBR) , Peningkatan SPAM Desa Blater Kecamatan Poncowarno (MBR),

Peningkatan SPAM Desa Donosari Kecamatan Sruweng (MBR), Peningkatan SPAM Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar, Peningkatan SPAM Desa Jatimulyo Kecamatan Alian (MBR), Peningkatan SPAM Desa Jlegiwinangun Kecamatan Kutowinangun (MBR), Peningkatan SPAM Desa Kedungwinangun Kecamatan Klirong, Peningkatan SPAM Desa Mangunweni Kecamatan Ayah (MBR), Peningkatan SPAM Desa Merden Kecamatan Padureso (MBR), Peningkatan SPAM Desa Pecarikan Kecamatan Prembun (MBR), Peningkatan SPAM Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso, Peningkatan SPAM Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng (MBR), Peningkatan SPAM Desa Wagirpandan Kecamatan Karanggayam (MBR), Peningkatan SPAM Perumda Air Minum Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen - Unit Poncowarno (KAMBK)

b. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan SPAM Desa Pengempon Kecamatan Sruweng, Rehabilitasi dan Pemeliharaan SPAM Desa Plumbon Kecamatan Karangsambung (Pokir), Rehabilitasi dan Pemeliharaan SPAM Desa Seliling Kecamatan Alian, Rehabilitasi dan Pemeliharaan SPAM Desa Wonotirto Kecamatan Karanggayam

3. Program Penataan Bangunan Gedung

- a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- b. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan Pemeliharaan Gedung kantor Kejaksaan Pemeliharaan Gedung Kantor Paket 1, Paket 2 dan Paket 3, Pemeliharaan Gedung Polsek Petanahan, Pemeliharaan Gedung Polsek Rowokele, Rehabilitasi Ruang Pelayanan Disdukcapil, Lingkungan Kecamatan Padureso
- d. Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota
- e. Bantuan Tekhnis Pembangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Banguna

4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- a. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota. Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang bersama pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan kegiatan pengadaan semen / PC meliputi 26 kecamatan di kabupaten kebumen, 373 Desa dan 1654 RTRW Se Kabupaten Kebumen

5. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- a. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- b. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagan Konstruksi.
- c. Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota.
- d. Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
- e. Penertiban Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non kecil dan kecil)

6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - 1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
 - 2) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
 - 2) System Informasi Penataan Ruang
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten /kota.

7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya.
 - 2) Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
 - Pemeliharaan Embung Giritirto Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam
 - Pemeliharaan Embung Giritirto Desa Giritirto Kecamatan Karanggayam
 - Pemeliharaan Embung Rahayu Desa Rahayu Kecamatan Padureso

- b. Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 1) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa.
 - 2) Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), pada tahun 2023 telah dilaksanakan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Bocor Kecamatan Buluspesantren, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Candiwulan Kecamatan Adimulyo, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Giwangretno Kecamatan Sruweng, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Jatiluhur Kecamatan Rowokele, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Kalitengah Kecamatan Gombong, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Kebagoran Kecamatan Pejagoan (DAPAT), Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa/Kelurahan Wonkriyo Kecamatan Gombong (P), Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Kemukus Kecamatan Gombong, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Pesuningan Kecamatan Prembun (DAPAT), Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Trikarso Kecamatan Sruweng, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Karanggayam Kecamatan Karanggayam (P).
 - 3) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Tahun 2023 23 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gelempang Desa Wonoharjo Kecamatan Rowokele, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Giyanti I Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Gunung Tumpeng Desa Banioro Kecamatan Karangsembung, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kali Mini Sempor Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kayubancet Desa Banioro Kecamatan Karangsembung, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kebaturan Desa Sitiadi Kecamatan Puring, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kembang Abang Desa Kebonsari Kecamatan Petanahan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Kendal Desa Jatijajar Kecamatan Ayah, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Penggarangan Desa Madurejo Kecamatan

Puring, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Perkututan Desa Jatijajar Kecamatan Ayah, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Seling Desa Seling Kecamatan Karangsembung, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Somagede II Desa Somagede Kecamatan Sempor, Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Tlepok Desa Tlepok Kecamatan Karangsembung.

4) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah melaksanakan Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Arjosari Desa Arjosari Kecamatan Adimulyo, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Blado II Desa Kedaleman Wetan Kecamatan Puring, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Clapar Desa Kenteng Kecamatan Sempor, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Giyanti III Desa Giyanti Kecamatan Rowokele, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Karangduren Desa Kalibeji Desa Sidoharum Kecamatan Sempor, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Kebonsari Desa Kebonsari Kecamatan Petanahan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Kedungsingih Desa Sadangwetan Kecamatan Sadang, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Kemputan Kecamatan Sadang, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Klagon Desa Candi Kecamatan Karanganyar, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Pengempon Desa Pengempon Kecamatan Sruweng, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Pengilon Desa Mangunweni Kecamatan Ayah, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Sanawi Desa Pringtutul Kecamatan Rowokele, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Sekarteja Desa Sekarteja Kecamatan Adimulyo, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Semampir Desa Purbowangi Kecamatan Buayan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Sendangdalem Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Sikayu Desa Sikayu Kecamatan Buayan, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Wagirpandan II Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele, Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Wonorejo Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar

5) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah

Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah melaksanakan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah Desa Nampudadi Kecamatan Petanahan serta Kegiatan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi

8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

1) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase

Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan Pemeliharaan Pemeliharaan Drainase Bedogol Desa Banjarwinangun Kecamatan Petanahan (P), Pemeliharaan Drainase Desa Ayah Kecamatan Ayah, Pemeliharaan Drainase Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng (P), Pemeliharaan Drainase Desa Tersobo Kecamatan Prembun, Pemeliharaan di RT 05 dan RT 07, RW 01 Kelurahan Panjar Kecamatan Kebumen, Pemeliharaan Drainase UPTD PBPJJ Wiayah Gombong, Drainase UPTD PBPJJ Wiayah Karanganyar, Drainase UPTD PBPJJ Wiayah Kebumen, Drainase UPTD PBPJJ Wiayah Kutowinangun, Pemeliharaan Drainase Jalan depan Pasar Dorowati Desa Dorowati Kecamatan Klirong, Pemeliharaan Drainase Jalan Giwangretno - Adikarto Desa Sidoharjo Kecamatan Sruweng, Pemeliharaan Drainase Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen (P), Pemeliharaan Drainase Ruas Jalan Gentan - Miritpetikusan Desa Wining Kecamatan Mirit, Pemeliharaan Sudetan I Drainase Silangsur kecamatan Bonorowo , Pemeliharaan Drainase Desa Sidomukti Kecamatan Kuwarasan

2) Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah melaksanakan Pembangunan Drainase Bersole Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan, dan Pembangunan Drainase Gg. Telasih Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen

3) Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan

Adapun Pada Tahun 2023 Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah melaksanakan Rehabilitasi Saluran Drainase Jl. Mayjend Sutoyo (Timur Sakuran Sekunder Kebumen) - Jl. Kusuma - Jl. Arungbinang

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja Utama adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap pencernaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor public seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematika tersebut timbul karena sektor public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintah Sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021

Indikator sasaran ini menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan menjadi acuan dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kebumen. indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai berikut

Tabel 7
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
A	Indikator Tujuan 1							
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,00	84,00	85,00	85,50	85,50	85,50
A.1.	Indikator Sasaran (IKU Urusan Pertanahan)							
	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100	100	100	100	100	100
B	Indikator Tujuan 2							
	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks	53,81	59,27	63,10	66,89	70,69	70,69
B.1.	Indikator Sasaran (IKU Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)							
	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	57,35	59,16	61,48	63,67	65,89	65,89

Sumber : RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel 8
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		CAPAIAN 2020	PERKIRAAN CAPAIAN 2021	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	(%)
1.	Persentase Infrastruktur Sumber Daya Air irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	80	80	77,8	80	82,5	85	87,5	87,5
2.	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	17,54	18,75	20	21,25	22,5	23,75	25	25
3.	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	15,98	15,98	15,98	17,04	18,01	19,98	20,04	20,04
4.	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	80,13	80,13	81,14	81,14	82,15	83,16	83,84	83,84
5	Prosentase pekerjaan yang tersusun DEDnya	%	%	19	21	23	25	27	27
6	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	70,94	70,94	74,23	76,23	79,48	82,23	85,18	85,18
7	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	44,92	44,92	44,92	50,15	55,08	60	64,92	64,92
8	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	75	75	91,15	91,25	91,35	91,45	91,55	91,55

Sumber : RPJMD Kebumen Tahun 2021-2026

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan sasaran program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Tujuan :							
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	84 Indeks	84 Indeks				83
	Sasaran :							
	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100 %	100 %				100 %
2	Tujuan							
	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	59,27 Indeks	59,27 Indeks				59,27
	Sasaran :							
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum	59,16 Indeks	59,16 Indeks				59,16

Sumber: Perjanjian Kinerja DPUPR Tahun 2023

Pada TaPhun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen melaksanakan Perubahan terhadap Perjanjian Kinerja dikarenakan adanya perubahan anggaran dan target kinerja output pada sub kegiatan.

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 didukung dengan anggaran murni sebesar Rp.156.699.853.000, dengan rincian Belanja Operasi Rp.61.746.335.000,dan Belanja Modal Rp.94.953.518.000, Selanjutnya setelah perubahan APBD 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami perubahan anggaran menjadi Rp. 178.970.797.28,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.67.314.547.288,- dan Belanja Modal Rp.111.656.250.000,-.

Tabel 10
Anggaran Pendukung Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.278.885.000,-	Rp. 21.923.320.000,-
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 16.302.473.000,-	Rp. 15.424.055.000,-
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 11.829.164.000,-	Rp. 11.840.213.000,-
4.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 5.604.570.000,-	Rp. 5.461.678.000,-
5.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 4.217.512.000,-	Rp. 4.300.007.000,-
6.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 9.988.638.000,-	Rp. 10.088.638.000,-
7.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 85.921.196.000,-	Rp. 109.214.422.288,-
8.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 99.699.000,-	Rp. 99.699.000,-
9.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 420.084.000,-	Rp. 581.133.000,-
10.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 37.632.000,-	Rp. 37.632.000,-
	TOTAL	Rp. 156.699.853.000,-	Rp. 178.970.797.288,-

Sumber: DPA DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini dilaporkan akuntabilitas kinerja meliputi hasil pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, hasil analisis pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen, serta akuntabilitas keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023.

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut: Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, persentase (%) capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90 %	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 55%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1 Capaian Kinerja DPUPR Ta.2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berperan sebagai urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah,

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Strategis sesuai dengan Program dan Kegiatan, dan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kegiatan yang meliputi Input (Masukan), Output (Keluaran) dan Outcome (Hasil).

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen mendukung terlaksananya Misi ke 1 (satu) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi dan Misi Ke IV Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang kemudian Tujuan ini dijabarkan dalam 2 (dua) sasaran yaitu:

- a. Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan
- b. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah

a) Realisasi Capaian DPUPR

Sasaran dan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 didasarkan pada indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ini merupakan perjanjian kinerja tahun ketiga periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Hasil pengukuran tingkat capaian kinerja 2 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dapat disajikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel.11
Target dan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	Kategori
Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik						
1	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Prosentase Penanganan Sengketa Lahan	100%	100%	100%	Sangat Baik
Tujuan : Mewujudkan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah						
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	59,27%	Realisasi dicukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB		
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	59,16%	57,94%	97,94%	Sangat Baik

Sumber: DPA DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Dari table di atas, dapat dilihat pencapaian dari indikator Sasaran Strategis 1 (Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan) adalah dengan predikat sangat baik (100%), Sedangkan pada sasaran ke 2 (Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah) dengan predikat sangat baik (100%), dan pada sasaran strategis (Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah) dengan predikat sangat baik (97,94). Dengan demikian pencapaian indikator sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen secara rata-rata adalah sangat baik (100%). Melihat 2 sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tercapai 100%, maka hal ini menunjukkan efektivitas dari kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 2023.

Adapun faktor yang mendorong tercapainya target dan efisien sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. SDM yang Memadai dan adanya Komitmen Pemerintah Daerah
2. Dukungan Pemerintah Pusat dalam Pengalokasian Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi
3. Perbaikan kinerja seluruh jajaran pendukung pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur baik dari pemerintah maupun pihak swasta.
4. Dukungan seluruh masyarakat kabupaten kebumen
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan penyelesaian tugas dan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten kebumen
6. Perencanaan yang tepat dalam hal penganggaran, jadwal dan pelaksanaan serta hasil evaluasi tahun lalu.

b) Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan urusan pemerintahan di dukung melalui 9 (sembilan) program unggulan yang meliputi : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Adapun capaian kinerja program dapat dilihat sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 12
Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

No.	Program	Indikator Program	Satuan	Target Dan Realisasi Kinerja Program			Keterangan
				Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	96,30	100	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Prosentase Infrastruktur	%	100	93,13	100	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase pelayanan Air Bersih perpipaan	%	100	92,13	100	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase,	Prosentase Saluran Draenase dalam kondisi baik	%	100	94,91	100	
5	Penataan Bangunan Gedung,	Prosentase Bangunan Pemerintah dalam kondisi baik	%	100	95,93	100	
6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya,	Prosentase Pekerjaan yang tersusun Ded nya	%	100	94,92	100	
7	Program Penyelenggaraan Jalan,	Prosentasee Jalan Kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	%	100	96,59	100	
8	Program Pengembangan Jasa Konstruksi,	Prosentase Penyedia Jasa Kontruksi yang telah dibina dan Nilainya Baik	%	100	98,00	100	
9	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.	Prosentase Penanganan Sengketa Lahan	%	100	99,85	100	

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2023 menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, hal ini ditandai dengan capaian kinerja program mencapai 100%. Hasil capaian kinerja program ini menjadi pendorong tercapainya Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen yang meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan dan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah.

c) Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Capaian kinerja terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 dan 2023 secara umum mencapai 100%. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen terdapat 2 (dua) indikator berupa indeks kepuasan masyarakat, indeks kualitas Infrastruktur Daerah dan Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum. Untuk selanjutnya realisasi dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran dan realisasi kinerja Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada berikut

Tabel 13
Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

Tahun 2022					Tahun 2023				
Sasaran	Indikator	Target	Rea	Tingkat Cap	Sasaran	Indikator	Target	Rea	Tingkat Cap
Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Prosentase Penanganan sengketa Lahan	100%	100%	100%	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Indeks Kualitas Perencanaan	100%	100%	100%
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	53,81	Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB		Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	59,27	Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB	
Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	57,35	57,89	100,9	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	59,16	57,94	97,94%

Tabel 14
Capaian Kemajuan sasaran strategis DPUPR tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2026	Tingkat kemajuan
1	Tertanganinya Kasus Sengketa Lahan	Prosentase Penanganan sengketa Lahan	100		
2	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	Realisasi di cukupi dari DPUPR dan DISPERKIMHUB		
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	57,94	65,89	88,05 %

Sumber : DPU PR Kabupaten Kebumen 2023

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum capaian kemajuan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Pada Tahun 2022 dan 2023 mempunyai capaian kinerja 100%. Namun ada 1 sasaran yang capain kinerjanya masih dibawah 100 yaitu sasaran Meningkatkan Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah dengan capain sebesar 97,94%.

1. Analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi

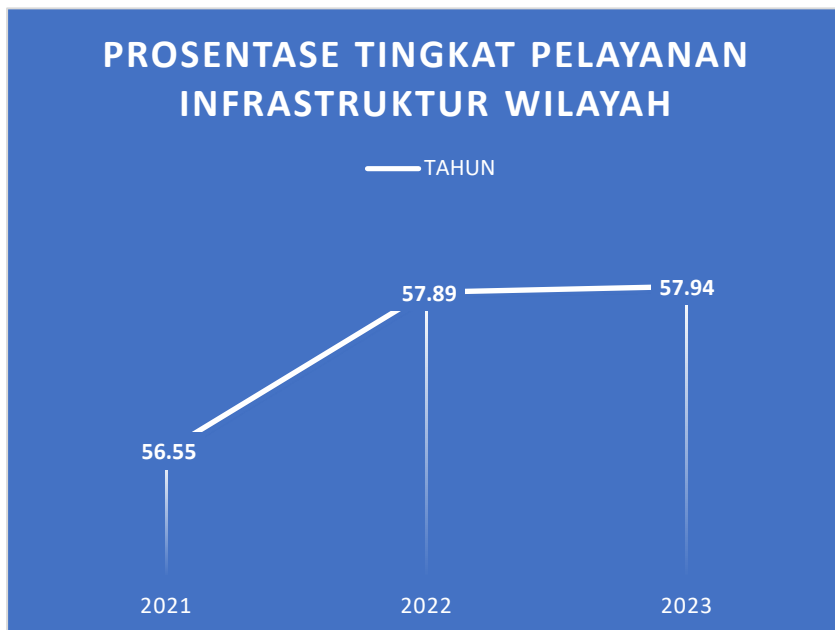
Sesuai dengan Sasaran Dinas Pekerjaan umum dan Penataan ruang yaitu meningkatkan indeks Kualitas Infrastruktur Daerah. Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) indikator sasaran yaitu Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum. Rumus perhitungan indikator Persentase tingkat pelayanan infrastruktur Pekerjaan umum dengan menggunakan penjumlahan antar indikator pendukung yaitu:

(Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik + Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaas + Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap/3)

Tabel 15
Realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Analisis Keberhasilan/kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	59,27	57,94	97,94%	Sesuai rumus perhitungan realisasi	

Gambar
Realisasi kinerja Meningkatkan Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah Tahun 2021 s/d Tahun 2023



Berdasarkan Tabel dan Gambar diatas untuk Realisasi Capaian Kinerja DPUPR serta untuk pencapaian kinerja program dan kegiatan tahun 2023 melampaui target atau masuk dalam kategori sangat baik, sedangkan untuk Meningkatkan Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah, didukung oleh 3 (tiga) Indikator Program, sebagai berikut :

1. Capaian Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen sesuai Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2023 adalah 960,358 kilometer. Dimana Proporsi jalan Kabupaten Kebumen yang rusak berat masih terdapat 137,522 Km atau sebesar 13,52 % yang lokasinya tersebar di 22 wilayah yaitu kecamatan Ayah, Rowokele, Buayan, Sempor, Kuwarasan, Petanahan, Puring, Adimulyo, Karanggayam, Sadang, Karangsambung, Alian, Pejagoan, Petanahan, Sruweng Klirong, Poncowarno, Kutowinangun, Prembun, Ambal, Mirit, Padureso. Adapun data panjang dan proporsi jalan berdasarkan kondisi tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 16
Panjang dan Proporsi Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Kebumen
Tahun 2021-2026

NO.	URAIAN	Kondisi awal	PANJANG JALAN (km)
		2022	2023
1	Kondisi Baik	292,179	450,569
2	Kondisi Sedang	416,841	271,269
3	Kondisi Rusak Ringan	162,026	157,790
4	Kondisi Rusak Berat	89,312	137,522
5	Jalan secara keseluruhan	960,358	960,358
Proporsi Kondisi Baik (%)		30,424	44,30
Proporsi Kondisi Sedang (%)		43,405	26,67
Proporsi Kondisi Rusak Ringan (%)		16,871	15,51
Proporsi Kondisi Rusak Berat (%)		9,30	13,52

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2023

Pada tahun 2023 sesuai SK Jalan total panjang jalan kabupaten adalah dari tahun sebelumnya 960,358 Km menjadi 1.017,150, adapun realisasi kinerja DPUPR terkait capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada awal tahun 2023 adalah sepanjang 721,838 kilometer atau mencapai sebesar 70,97 %. Kondisi ini mengalami peningkatan status jalan dari kondisi sedang ke kondisi baik, yaitu sebesar 39,79 %, atau 179,300 km. Jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya dimana jalan kondisi mantap pada tahun 2023 mengalami peningkatan sepanjang 12,658 Kilometer atau mencapai 1,75 %.

Sedangkan dalam target RPJMD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten kebumen pada tahun 2023 sebesar 76,23 % dengan realisasi 70,97%. belum tercapai sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya dikarenakan pada tahun 2023 jalan dengan kondisi rusak ringan mengalami peningkatan sebesar 35,28 % atau sepanjang 44,810 km.

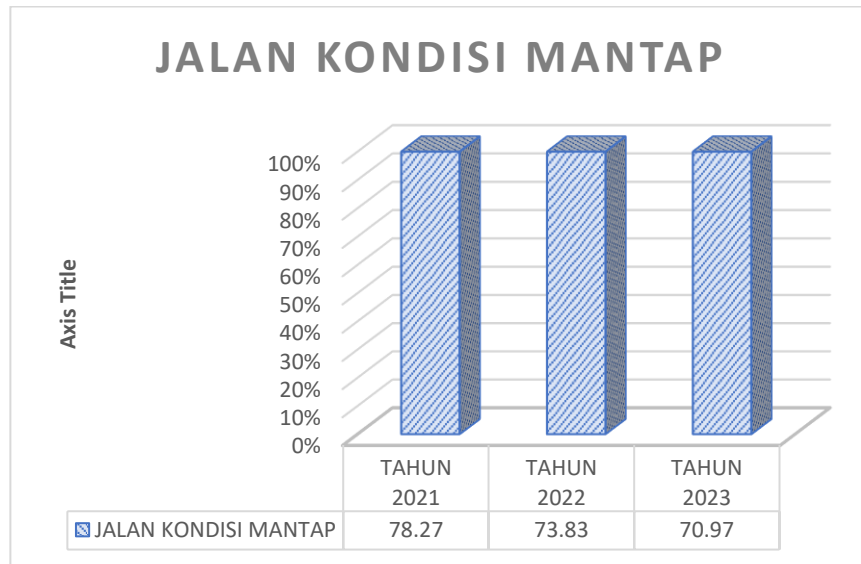
(Perhitungan realisasi menggunakan Prosentase Perbandingan (jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap / jumlah panjang jalan kabupaten x 100%).

Tabel.17
Capaian Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap Tahun 2023

No	IKU OPD, Program / Kegiatan Pendukungnya	Satuan	Kondisi awal Th.2021	TAHUN 2023			T.Akhir RPJMD 2021
				Target	Realisasi	Capaian	
1	Capaian jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	78,27	76,23	70,97	93,10	82,00

Tabel 18
Ketersediaan Jalan Sesuai Kondisi Di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RPJMD 2021-2026	REALISASI KINERJA TAHUN 2021	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2023	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	REALISASI KINERJA TAHUN 2026
KONDISI JALAN							
a. BAIK	-	584,109	292,179	450,569	-	-	-
b. SEDANG	-	167,516	416,841	271,269	-	-	-
c. RUSAK RINGAN	-	115,411	162,026	157,790	-	-	-
d. RUSAK BERAT	-	93,322	89,312	137,522	-	-	-



Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, dilakukan melalui beberapa Sub. Kegiatan yaitu : Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Pelebaran Jalan Menuju Standar, Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, dan Pemeliharaan Berkala Jembatan, Sedangkan Alokasi anggaran untuk mencapai sasaran tersebut. sebesar Rp. 109.214.422.288 sedang realisasinya sebesar Rp. 107.212.410.935 (98,17%).

2. Cakupan Pelayanan Air Bersih

Pada tahun 2023 Jumlah rumah tangga yang sudah terlayani air bersih sebesar 449.313 kk Sedangkan jumlah rumah tangga yang berhak mendapatkan pelayanan sebesar 461.823 kk, adapun Capaian indikator sasarannya sebesar 97,29%. Capaian pelayanan air bersih sesuai dengan SPM mencakup keseluruhan dengan 3 (tiga) sumber perolehan air dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu melalui PDAM, SPAM Pedesaan dan Sumber air lain (Sumur, langsung dari mata air). namun angka tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan dalam SPM yaitu 100% rumah tangga telah memiliki akses air minum. Dengan permasalahan terbatasnya sumber mata air bersih, sumber akses air minum belum layak dan kondisi geografis kabupaten kebumen dan Ketersediaan Dana.

Rumus Perhitungan Realisasi Menggunakan Persentase Perbandingan (Jumlah RT terlayani air bersih / jumlah rumah tangga) x 100

Tabel 19.
Capaian pelayanan air bersih sesuai dengan SPM
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2023							Keterangan (Permasalahan)
		Jumlah Orang yang berhak mendapat layanan	Jumlah orang yang Terlayani				Capaian = $(7):(3) \times 100\%$	TARGET	
			PDAM	SPAM PERDESAAN	SUMBER AIR LAIN	JUMLAH = (4)+(5)+(6)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	461.823	35.330	49.714	364.269	449.313	97.29%	100%	Ketersediaan Dana & Mata Air

Tabel 20
Realisasi Capaian pelayanan air bersih perpipaan
Kabupaten Kebumen Tahun 2023

INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2023					
	Total Jumlah Penduduk Seluruhnya	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI			JUMLAH = (3)+(4)	CAPAIAN = $(5):(2) \times 100\%$
		SAMBUNGAN RUMAH TAHUN 2023	PDAM	SPAM PERDESAAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Prosentase Pelayanan air Bersih Perpipaan Tahun 2023	1.409.951	85.044	141.320	198.856	340.176	24.14%

Sumber: DPUPR Kabupaten Kebumen, 2023

Prosentase Pelayanan air Bersih Perpipaan pada Tahun 2023 yang melalui jalur perpipaan yang digunakan *rumah tangga sejumlah 340.176 jiwa* sedangkan Total Jumlah Penduduk Seluruhnya pada tahun 2023 sebesar 1.409.951 jiwa atau realisasi sebesar 24.14 % lebih tinggi dari target OPD yang direncanakan sebesar 21.25 %.

Keberhasilan indikator ini didukung anggaran yang memadai, perencanaan yang baik, serta ketersediaan sumber mata air dan pengelola (Kelompok Pengelola SPAM), apabila sumber mata air banyak dan pengelolaan yang baik berkelanjutan maka bangunan akan berfungsi dengan baik, sehingga air bersih dapat tersalurkan ke masyarakat yang membutuhkan terutama bagi daerah yang krisis air bersih.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dilakukan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Adapun Kegiatannya Meliputi : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota, Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, Pengembangan SDM dan Kelenbagaan Pengelolaan SPAM, dan Operasi Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan.

Indikator ini didukung oleh ketersediaan anggaran baik dari APBD/DAK serta didukung oleh 1 (satu) Program dan 4 (Empat) kegiatan. Sedangkan Alokasi anggaran untuk mencapai cakupan Pelayanan Air Bersih yang bersumber dari APBD dan DAK sebesar Rp.11.840.213.000,00 ataupun realisasinya 10.908.262.842,00 (92,13%) adapun realisasinya sebesar Rp. 7.184.097.988,00 (88,52%)

Tabel.21
Capaian Sasaran Strategis
Cakupan Pelayanan Air Bersih dari Tahun 2023

No	IKU OPD, Program/Kegiatan Pendukungnya	Satuan	Kondisi awal Th.2021	TAHUN 2023			Target .Akhir RPJM 2021
				Target	Real	Ca paian	
1	Cakupan pelayanan air bersih	%	87.80	100,00	97.29	97.29	100,00



3. Capaian Jaringan Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Pada Tahun 2023 total luasan jaringan irigasi adalah 12.260,01 Ha, kondisi baik sebesar 9.355,04 Ha (76,31%), kondisi sedang sebesar 182,02 Ha (1,51%), kondisi rusak ringan sebesar 151,35 Ha (1,23%), dan kondisi rusak berat sebesar 2.568,60 Ha (20,95%). Jika dibandingkan dengan Tahun Lalu capaian jaringan irigasi dalam kondisi baik naik sebesar 295,32 ha atau (2,40%) . itu menandakan bahwa kinerja DPUPR telah sesuai target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu masih ada banyaknya saluran irigasi dan bendungan yang masih mengalami kerusakan sebesar 2.289,27 ha dan masih membutuhkan perbaikan dan perawatan.

Rumus perhitungan realisasi menggunakan perbandingan (jumlah luasan jaringan irigasi dalam kondisi baik / total luasan jaringan irigasi x 100%)

Tabel 22.
Capaian Jaringan Irigasi kabupaten Dalam Kondisi Baik

No	IKU OPD, Program/ Kegiatan Pendukungnya	Satuan	Kondisi awal Th 2021	TAHUN 2023			Target. Akhir RPJMD 2021
				Target	Real	Capaian	
1	Capaian jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	75,17	80,00	78,71	98,39	87,5



Untuk mencapai sasaran strategis tersebut dilakukan melalui Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Adapun Sub.kegiatannya adalah Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa, Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan, dan Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi. Adapun Alokasi anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut baik yang bersumber dari APBD/DAK sebesar Rp 14.926.007.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 13.930.654.100,00(93,00%)

Berdasarkan data Capaian Kinerja Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah sudah tercapai sesuai yang ditargetkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026,akan tetapi dalam proses pencapaian terdapat beberapa permasalahan dan upaya dalam mengatasi permasalahan yang ditempuh diantaranya sebagai berikut :

a. Permasalahan

- a) Masih banyak ditemukan infrastruktur jalan rusak yang disebabkan oleh kelebihan muatan (tonase) pengguna jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan, umur efektif dan umur ekonomis jalan yang banyak berkurang maupun akibat bencana alam.
- b) Masih banyak ditemukan masyarakat yang kesulitan dalam mobilisasi arus barang dan jasa antar wilayah dengan jarak tempuh cukup jauh, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya bangunan jembatan penghubung antar wilayah.

- c) Masih ditemukan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, hal ini disebabkan banyaknya instalasi pengolahan air bersih perdesaan yang tidak berfungsi dengan baik karena pengelolaan yang tidak maksimal maupun yang rusak karena kekeringan sumber mata air disamping pola konsumsi air bersih warga sebagian masih mengandalkan air bersih non perpipaan
- d) Kurang optimalnya fungsi bangunan drainase dengan masih ditemukan genangan air.
- e) Banyak daerah yang belum terjangkau aliran air irigasi sehingga masyarakat masih sulit mendapatkan air irigasi untuk pertanian pada musim kemarau
- f) Belum optimalnya penataan ruang di wilayah Kabupaten Kebumen, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan ruang dan kurangnya pengawasan serta pengendalian dan sosialisasi mengenai tata ruang di wilayah Kabupaten Kebumen.
- g) Adanya alih fungsi sawah beririgasi yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

b. Upaya mengatasi Permasalahan

1. Mengoptimalkan kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengembangan dan pemanfaatan peralatan, jalan secara rutin dan berkala yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.
2. Mengoptimalkan kegiatan Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada.
3. Pengadaan sumber air minum menggunakan skema kegiatan SPAM antar Desa sangat membantu Masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan air minum
4. Mengembangkan pemanfaatan air bersih, dan meningkatkan pengelolaan drainase secara optimal serta berkelanjutan
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3.3 Realisasi Anggaran Belanja

Pada tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen melaksanakan 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) Sub Kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp.178.970.797.288,00 dan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 173.278.974.570,00 (96,82%), sehingga terdapat sisa sebesar Rp.5.691.812.410,00 (3,18%)

Tabel 23
Realisasi Keuangan Tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	CAP	ANGGARAN			DEVIASI
			PAGU	REALISASI		KEU SPJ
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.923.320.000		21.923.320.000	21.112.535.528	96,30	3,7
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	127.937.000		127.937.000	125.909.250	98,42	1,58
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.017.000		47.017.000	46.609.250	99,13	0,87
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.920.000		80.920.000	79.300.000	98,00	2
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.846.570.000		19.846.570.000	19.073.238.240	96,10	3,9
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.107.744.000		19.107.744.000	18.355.538.662	96,06	3,94
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	738.826.000		738.826.000	717.699.578	97,14	2,86
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	268.557.000		268.557.000	264.195.849	98,38	1,62
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	268.557.000		268.557.000	264.195.849	98,38	1,62
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	47.983.000		47.983.000	45.185.200	94,17	5,83

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.983.000		47.983.000	45.185.200	94,17	5,83
Administrasi Umum Perangkat Daerah	307.066.000		307.066.000	304.819.519	99,27	0,73
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.100.000		40.100.000	40.063.500	99,91	0,09
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000		60.000.000	59.006.900	98,34	1,66
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000		25.000.000	24.607.000	98,43	1,57
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000		10.000.000	9.996.000	99,96	0,04
Penyediaan Bahan/Material	50.000.000		50.000.000	49.975.700	99,95	0,05
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000		115.000.000	114.214.719	99,32	0,68
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.966.000		6.966.000	6.955.700	99,85	0,15
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	450.000.000		450.000.000	428.644.300	95,25	4,75
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0		0	0	0,00	0
Pengadaan Mebel	30.000.000		30.000.000	29.530.000	98,43	1,57
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	420.000.000		420.000.000	399.114.300	95,03	4,97
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.583.000		302.583.000	299.156.315	98,87	1,13
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000		2.000.000	1.988.500	99,43	0,57
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.583.000		209.583.000	206.273.515	98,42	1,58
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.000.000		91.000.000	90.894.300	99,88	0,12

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	572.624.000		572.624.000	571.386.855	99,78	0,22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	368.260.000		368.260.000	367.915.617	99,91	0,09
Pemeliharaan Mebel	0		0	0	0,00	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.364.000		74.364.000	74.239.238	99,83	0,17
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000		130.000.000	129.232.000	99,41	0,59
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.424.055.000		15.424.055.000	14.363.651.284	93,13	6,87
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	498.048.000		498.048.000	487.273.184	97,84	2,16
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	55.000.000		55.000.000	53.732.500	97,70	2,3
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	0		0	0	0,00	0
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	352.400.000		352.400.000	347.672.300	98,66	1,34
Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	90.648.000		90.648.000	85.868.384	94,73	5,27

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.926.007.000		14.926.007.000	13.876.378.100	92,97	7,03
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	900.000.000		900.000.000	445.984.400	49,55	50,45
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0		0	0	0,00	0
Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	1.674.000.000		1.674.000.000	1.630.829.200	97,42	2,58
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	250.000.000		250.000.000	236.801.515	94,72	5,28
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.508.022.000		6.508.022.000	6.108.480.125	93,86	6,14
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	4.915.709.000		4.915.709.000	4.809.954.570	97,85	2,15
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	57.677.000		57.677.000	55.460.500	96,16	3,84
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	620.599.000		620.599.000	588.867.790	94,89	5,11
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	11.840.213.000		11.840.213.000	10.908.262.842	92,13	7,87
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	11.840.213.000		11.840.213.000	10.908.262.842	92,13	7,87
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	8.856.976.000		8.856.976.000	7.976.030.890	90,05	9,95
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.500.000.000		2.500.000.000	2.455.623.952	98,23	1,77
Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	121.943.000		121.943.000	120.595.600	98,90	1,1

Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	361.294.000		361.294.000	356.012.400	98,54	1,46
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.461.678.000		5.461.678.000	5.183.455.571	94,91	5,09
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.461.678.000		5.461.678.000	5.183.455.571	94,91	5,09
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	2.988.013.000		2.988.013.000	2.945.640.441	98,58	1,42
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	508.400.000		508.400.000	494.357.682	97,24	2,76
Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	1.580.000.000		1.580.000.000	1.466.153.948	92,79	7,21
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	385.265.000		385.265.000	277.303.500	71,98	28,02
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.300.007.000		4.300.007.000	4.125.001.260	95,93	4,07
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	4.300.007.000		4.300.007.000	4.125.001.260	95,93	4,07
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	136.640.000		136.640.000	135.467.831	99,14	0,86
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.982.785.000		1.982.785.000	1.886.012.500	95,12	4,88

Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	33.075.000		33.075.000	31.730.100	95,93	4,07
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	51.500.000		51.500.000	50.056.929	97,20	2,8
Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	24.380.000		24.380.000	21.998.600	90,23	9,77
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2.071.627.000		2.071.627.000	1.999.735.300	96,53	3,47
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	10.088.638.000		10.088.638.000	9.576.434.277	94,92	5,08
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	10.088.638.000		10.088.638.000	9.576.434.277	94,92	5,08
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	567.688.000		567.688.000	561.399.700	98,89	1,11
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	9.520.950.000		9.520.950.000	9.015.034.577	94,69	5,31
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	109.214.422.288		109.214.422.288	105.486.907.235	96,59	3,41
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	109.214.422.288		109.214.422.288	105.486.907.235	96,59	3,41
Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.195.053.000		1.195.053.000	1.189.569.400	99,54	0,46
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	1.594.820.000		1.594.820.000	1.400.551.240	87,82	12,18
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	587.079.000		587.079.000	565.353.000	96,30	3,7
Pembangunan Jalan	10.000.000.000		10.000.000.000	9.769.912.500	97,70	2,3

Pelebaran Jalan Menuju Standar	29.909.079.000		29.909.079.000	28.914.248.221	96,67	3,33
Pemeliharaan Berkala Jalan	37.810.211.000		37.810.211.000	36.474.669.750	96,47	3,53
Pemeliharaan Rutin Jalan	18.203.487.288		18.203.487.288	17.929.658.723	98,50	1,5
Pembangunan Jembatan	3.925.000.000		3.925.000.000	3.769.425.200	96,04	3,96
Pelebaran Jembatan	1.000.000.000		1.000.000.000	971.453.100	97,15	2,85
Pemeliharaan Rutin Jembatan	498.685.000		498.685.000	489.280.000	98,11	1,89
Pemeliharaan Berkala Jembatan	3.650.000.000		3.650.000.000	3.176.415.000	87,03	12,97
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	841.008.000		841.008.000	836.371.101	99,45	0,55
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	99.699.000		99.699.000	97.700.200	98,00	2
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	32.027.000		32.027.000	30.879.800	96,42	3,58
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	32.027.000		32.027.000	30.879.800	96,42	3,58
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	67.672.000		67.672.000	66.820.400	98,74	1,26
Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	67.672.000		67.672.000	66.820.400	98,74	1,26
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	581.133.000		581.133.000	579.659.081	99,75	0,25
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	313.816.000		313.816.000	313.359.938	99,85	0,15
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	83.232.000		83.232.000	82.946.038	99,66	0,34

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	230.584.000		230.584.000	230.413.900	99,93	0,07
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	91.848.000		91.848.000	91.426.709	99,54	0,46
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	35.926.000		35.926.000	35.710.800	99,40	0,6
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	29.622.000		29.622.000	29.499.700	99,59	0,41
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	26.300.000		26.300.000	26.216.209	99,68	0,32
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	113.217.000		113.217.000	112.845.462	99,67	0,33
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	57.970.000		57.970.000	57.787.600	99,69	0,31
Sistem Informasi Penataan Ruang	55.247.000		55.247.000	55.057.862	99,66	0,34
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	62.252.000		62.252.000	62.026.972	99,64	0,36
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	62.252.000		62.252.000	62.026.972	99,64	0,36
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	37.632.000		37.632.000	37.493.600	99,63	0,37
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.632.000		37.632.000	37.493.600	99,63	0,37
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.632.000		37.632.000	37.493.600	99,63	0,37
TOTAL	178.970.797.288		178.970.797.288	171.471.100.878	95,81	4,19

BAB IV PENUTUP

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Penilaian yang dilakukan mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel.

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Secara umum capaian kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan masuk dalam kriteria sangat baik, hal ini dapat diketahui dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a) Target Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2023 tercapai 59,16%, meliputi Indikator Prosentase Infrastruktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik dengan target sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 78,71% dengan nilai capaian 98,39%. Kemudian indikator Persentase Pelayanan Air Bersih dengan target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 97.29 % atau dengan nilai capaian 97.29 %.dan indicator Prosentase Jalan Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik dengan target 76,23%, dapat terealisasi sebesar 78,71% dengan nilai capaian 98,39%.

- b) Secara Umum Capaian kinerja program DPUPR Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 dikategorikan baik adapun rata-rata tercapai sebesar 96,82%. dimana terdapat beberapa program di DPUPR yang capaiannya kurang dari 100% yaitu untuk Program Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa , Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan dan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan
- c) Realisasi capaian kinerja secara keseluruhan sebesar 96,82%. Untuk mendukung apa yang telah ditetapkan visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tahun 2023 telah disediakan dana sebesar Rp. 178.970.797,288 dan realisasi sampai dengan akhir 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp. 173.278.974.578,00.

B. Permasalahan dan Kendala

Meskipun Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Kebumen dengan sasaran dan program Tahun 2023 dapat terpenuhi dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang bersifat teknis yang perlu di antisipasi di tahun-tahun mendatang. Permasalahan tersebut meliputi :

- 1) Masih banyak ditemukan infrastruktur jalan rusak yang disebabkan oleh kelebihan muatan (tonase) pengguna jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan, umur efektif dan umur ekonomis jalan yang banyak berkurang maupun akibat bencana alam.
- 2) Masih banyak ditemukan masyarakat yang kesulitan dalam mobilisasi arus barang dan jasa antar wilayah dengan jarak tempuh cukup jauh, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya bangunan jembatan penghubung antar wilayah.
- 3) Masih ditemukan masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih, hal ini disebabkan banyaknya instalasi pengolahan air bersih perdesaan yang tidak berfungsi dengan baik karena pengelolaan yang tidak maksimal maupun yang rusak karena kekeringan sumber mata air disamping pola konsumsi air bersih warga sebagian masih mengandalkan air bersih non perpipaan
- 4) Kurang optimalnya fungsi bangunan drainase dengan masih ditemukan genangan air.
- 5) Banyak daerah yang belum terjangkau aliran air irigasi sehingga masyarakat masih sulit mendapatkan air irigasi untuk pertanian pada musim kemarau.

C. Strategi Peningkatan Kinerja DPUPR

Beberapa strategi guna peningkatan kinerja yang dapat diimplementasikan di Tahun 2024, antara lain:

- 1) Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis DPUPR Kabupaten Kebumen sesuai Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan mengirimkan menjadi peserta diklat teknis
- 3) Perlu pencermatan Kembali dalam penentuan target pada beberapa kegiatan dan indikator kinerja dan besaran anggaran, sehingga tidak terjadi Kembali capaian kinerja yang dibawah target perencanaan.
- 4) Penetapan target kinerja disesuaikan dengan mempertimbangkan anggaran kas yang ada, termasuk besarnya anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tahun 2023 yang dapat kami susun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dengan harapan bermfaat bagi semua pihak, atas segala kritik dan saran yang sifatnya membangun kami ucapkan terima kasih.

Kebumen, Februari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten
Kebumen



JONI HERNAWAN, S.T.,M.T
NIP. 19700728 199803 1 006